



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN TRIWULAN I



Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, **Laporan Kinerja Triwulan I Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025** dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan triwulan ini berfungsi sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja sekaligus sebagai alat pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan pada periode triwulan berjalan. Penyusunan laporan mengacu pada struktur yang telah ditetapkan, meliputi: pendahuluan, capaian kinerja triwulan, identifikasi permasalahan/potensi peningkatan capaian, serta rencana tindak lanjut untuk periode berikutnya.

Melalui laporan ini, kami menyajikan perkembangan pelaksanaan kegiatan beserta capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun. Evaluasi tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran objektif mengenai progres kinerja sekaligus menjadi dasar pengambilan keputusan strategis dalam rangka mewujudkan **Program 3 Juta Rumah**, sebagaimana menjadi amanat Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

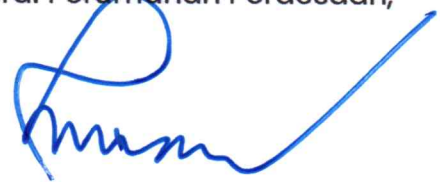
Kami berharap laporan triwulan ini dapat menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan kinerja. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini, baik melalui penyediaan data, koordinasi, maupun proses verifikasi.



Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi rujukan dalam upaya peningkatan kualitas kinerja di periode berikutnya.

Jakarta, 23 April 2025

 Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan,



Dr. Drs. Imran, M.Si., MA.Cd.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR TABEL.....	6
DAFTAR GAMBAR.....	7
BAB 1 PENDAHULUAN.....	9
1.1 Latar Belakang.....	9
1.2 Tugas dan Fungsi.....	9
1.3 Struktur Organisasi.....	11
BAB 2 CAPAIAN KINERJA.....	20
2.1 Capaian Program Triwulan I.....	20
2.1.1 Capaian Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Triwulan I.	20
2.1.2. Capaian Dukungan Manajemen Triwulan I.....	21
2.2 Capaian Kegiatan Triwulan I.....	27
2.2.1 Capaian Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan	
Perdesaan.....	27
2.2.1.1 Realisasi Kinerja Dukungan Manajemen Triwulan I.....	27
2.2.1.2 Realisasi Anggaran Triwulan I.....	32
2.2.2 Capaian Kegiatan Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan	
Perumahan Perdesaan.....	33
2.2.2.1 Realisasi Kinerja Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	
Triwulan I.....	33
2.2.2.2 Realisasi Kinerja Dukungan Manajemen Triwulan I.....	36
2.2.2.3 Realisasi Anggaran Triwulan I.....	39
2.2.3 Capaian Kegiatan Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan	
Penghunian Perumahan Perdesaan.....	41
2.2.3.1 Realisasi Kinerja Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	
Triwulan I.....	41
2.2.3.2 Realisasi Kinerja Dukungan Manajemen Triwulan I.....	42
2.2.3.3 Realisasi Anggaran Triwulan I.....	45
2.2.4. Capaian Kegiatan Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan.....	46
2.2.4.1 Realisasi Kinerja Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	
Triwulan I.....	46
2.2.4.2 Realisasi Kinerja Dukungan Manajemen Triwulan I.....	48
2.2.4.3 Realisasi Anggaran Triwulan I.....	50



2.2.5 Capaian Kegiatan Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan.....	52
2.2.5.1 Realisasi Kinerja Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Triwulan I.....	52
2.2.5.2 Realisasi Kinerja Dukungan Manajemen Triwulan I.....	54
2.2.5.3 Realisasi Anggaran Triwulan I.....	56
2.2.6 Capaian Kegiatan Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan.....	57
2.2.6.1 Realisasi Kinerja Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Triwulan I.....	57
2.2.6.2 Realisasi Kinerja Dukungan Manajemen Triwulan I.....	59
2.2.6.3 Realisasi Anggaran Triwulan I.....	62
2.3 Permasalahan/Potensi Capaian Triwulan I.....	63
BAB 3 PENUTUP.....	66
3.1 Rencana Tindak Lanjut.....	66
L.....	67



Tabel 2.1.1 Capaian Program Triwulan I Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025.....	20
Tabel 2.1.2 Capaian Dukungan Manajemen triwulan I Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.....	22
Tabel 2.2.1.1 Capaian Dukungan Manajemen Triwulan I Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.....	28
Tabel 2.2.1.2 Capaian Anggaran Triwulan I Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.....	32
Tabel 2.2.2.1 Capaian Triwulan I Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan.....	34
Tabel 2.2.2.2 Capaian Dukungan Manajemen Triwulan I Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan.....	37
Tabel 2.2.2.3 Capaian Anggaran Triwulan I Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan.....	40
Tabel 2.2.3.1 Capaian Triwulan I Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan.....	41
Tabel 2.2.3.2 Capaian Dukungan Manajemen Triwulan I Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan.....	42
Tabel 2.2.3.3 Capaian Anggaran Triwulan I Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan.....	45
Tabel 2.2.4.1 Capaian Triwulan I Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan.....	46
Tabel 2.2.4.2 Capaian Dukungan Manajemen Triwulan I Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan.....	48
Tabel 2.2.4.3 Capaian Anggaran Triwulan I Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan.....	50
Tabel 2.2.5.1 Capaian Triwulan I Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan.....	52
Tabel 2.2.5.2 Capaian Dukungan Manajemen Triwulan I Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan.....	54
Tabel 2.2.5.3 Capaian Anggaran Triwulan I Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan.....	57
Tabel 2.2.6.1.1 Capaian Triwulan I Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan.....	58
Tabel 2.2.6.1 .2 Capaian Triwulan I Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan.....	58
Tabel 2.2.6.2 Capaian Dukungan Manajemen Triwulan I Direktorat Peningkatan	



Kualitas Perumahan Perdesaan.....60

Tabel 2.2.6.3 Capaian Anggaran Triwulan I Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan.....62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan..... 11





BAB I

PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi sepanjang Triwulan I Tahun 2025, dan dalam rangka melaksanakan visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” selaras dengan Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia Periode 2024 – 2029. Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 ini juga disusun sebagai alat pengendali kinerja berdasarkan masukan baik dari pihak internal ataupun eksternal Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Triwulan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, serta Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Tugas dan Fungsi

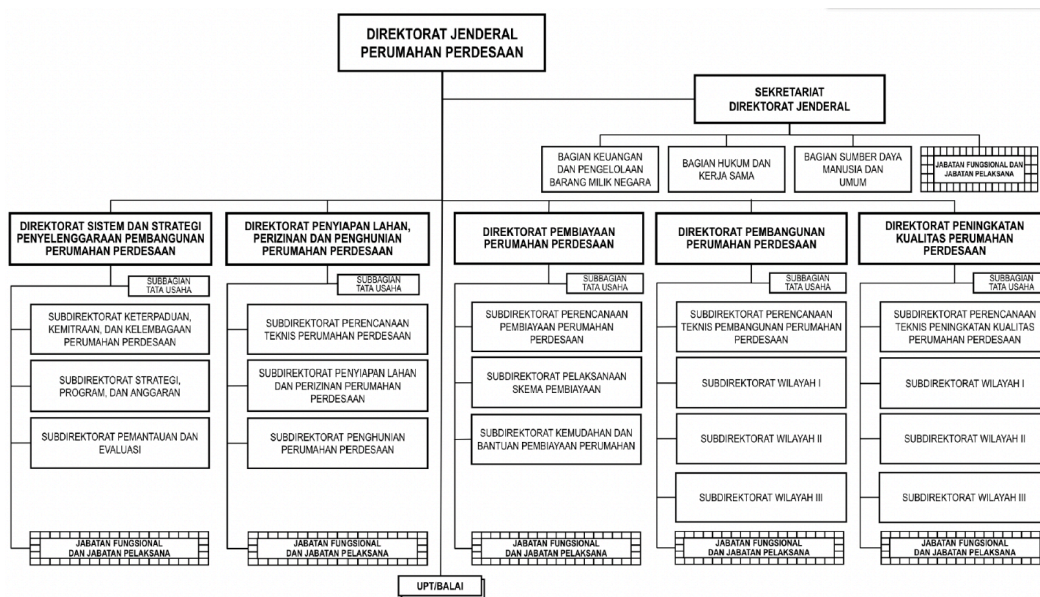
Sebagai salah satu Unit Organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan perumahan perdesaan. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan dan penyiapan penghunian, penyusunan skema pembiayaan, pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas perumahan di perdesaan;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan dan penyiapan penghunian, penyusunan skema pembiayaan, pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas perumahan di perdesaan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan dan penyiapan penghunian, penyusunan skema pembiayaan, pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas perumahan di perdesaan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan dan penyiapan penghunian, penyusunan skema pembiayaan, pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas perumahan di perdesaan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan dan penyiapan penghunian, penyusunan skema pembiayaan, pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas perumahan di perdesaan;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

1.3 Struktur Organisasi

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PKP adalah sebagai berikut.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan terdiri atas:

- Sekretariat Direktorat Jenderal;
- Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan;
- Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan;
- Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan;
- Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan; dan
- Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan.

Susunan struktur organisasi Direktorat Jenderal Perumahan di atas dapat jelaskan sesuai tugas dan fungsi, sebagai berikut:

1.3.1 Sekretariat Direktorat Jenderal

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam penyusunan laporan akuntansi dan laporan barang milik negara;
- b. pelaksanaan administrasi perbendaharaan dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak;
- c. pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
- d. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum serta penyelenggaraan komunikasi publik Direktorat Jenderal;
- e. pelaksanaan pembinaan urusan sumber daya manusia, organisasi, dan tata laksana, serta reformasi birokrasi;
- f. pelaksanaan penyusunan laporan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha, dan rumah tangga Direktorat Jenderal.

1.3.2 Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan

Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan dan pengembangan strategi, penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan kemitraan dan kelembagaan, pengelolaan data dan sistem informasi, serta pemantauan dan evaluasi kinerja di bidang pembangunan perumahan perdesaan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan strategi pembangunan perumahan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah;
- b. penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
- c. pelaksanaan dan pengendalian program dan anggaran tahunan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber pembiayaan lainnya di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
- d. pelaksanaan kemitraan dan pembinaan kelembagaan di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
- e. pelaksanaan kerja sama dan pinjaman dan hibah luar negeri di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
- f. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan perumahan perdesaan; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

1.3.3 Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan

Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, rencana teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rencana penyiapan lahan, koordinasi perizinan, dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan dan penghunian di bidang pembangunan perumahan perdesaan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program, anggaran, dan penyusunan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan, dan penghunian di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
- b. pelaksanaan pembinaan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyiapan lahan, perizinan, dan penghunian di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyiapan lahan, perizinan, dan penghunian di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
- d. pelaksanaan koordinasi penyiapan lahan di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
- e. pelaksanaan koordinasi penyiapan perizinan di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
- f. pelaksanaan koordinasi, pendampingan dan validasi data penghunian di bidang pembangunan perumahan perdesaan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

1.3.4 Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan

Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penyaluran kemudahan dan bantuan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan dan supervisi, pelaksanaan kemitraan dan pembiayaan kreatif serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembiayaan perumahan perdesaan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan anggaran di bidang pembiayaan perumahan perdesaan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan perumahan perdesaan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan perumahan perdesaan serta penyaluran kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan perdesaan;
- d. koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan pembiayaan perumahan perdesaan;
- e. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembiayaan perumahan perdesaan;
- f. penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan perumahan perdesaan;
- g. pelaksanaan pelayanan publik di bidang pembiayaan perumahan perdesaan;
- h. pelaksanaan kemitraan, kerja sama pemerintah dengan badan usaha, investasi dan pembiayaan kreatif di perdesaan;
- i. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembiayaan perumahan perdesaan;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembiayaan perumahan perdesaan;
- k. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

1.3.5 Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan

Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan strategi penyelenggaraan pembangunan, penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pembangunan, pengelolaan data dan informasi, serta pemantauan dan

evaluasi penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perdesaan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan strategi penyelenggaraan pembangunan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
- b. penyusunan program dan anggaran penyelenggaraan pembangunan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
- c. penyusunan perencanaan teknis penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
- e. pelaksanaan kebijakan pembangunan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
- f. pelaksanaan pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
- g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perdesaan;

- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perdesaan; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

1.3.6 Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan

Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program anggaran, penyusunan rencana teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, fasilitasi pendataan dan verifikasi, fasilitasi pemberdayaan dan kemitraan, pelaksanaan bantuan rumah swadaya, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas pembangunan perumahan perdesaan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program anggaran, penyusunan rencana teknis, standar pedoman peningkatan kualitas pembangunan perumahan perdesaan;
- b. fasilitasi pendataan dan verifikasi rumah tidak layak huni di bidang penyelenggaraan peningkatan kualitas pembangunan perumahan perdesaan;
- c. fasilitasi pemberdayaan masyarakat, fasilitasi akses kemitraan, dan layanan jasa bidang di bidang penyelenggaraan peningkatan kualitas pembangunan perumahan perdesaan;
- d. penyiapan penerima bantuan dan pendampingan dalam pelaksanaan bantuan stimulan di bidang peningkatan kualitas pembangunan perumahan perdesaan;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan pemanfaatan bantuan di bidang peningkatan kualitas pembangunan



perumahan perdesaan; dan pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

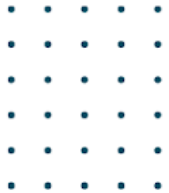




BAB II

CAPAIAN

KINERJA



BAB 2 CAPAIAN KINERJA

2.1 Capaian Program Triwulan I

2.1.1 Capaian Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Triwulan I

Capaian kinerja triwulan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dengan target perjanjian kinerja. Target kinerja triwulan I Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan diperoleh dari Rencana Strategis RPJMN 2025–2029. Adapun persentase capaian pada triwulan I Tahun 2025, diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1.1 Capaian Program Triwulan I Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian Triwulan I
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
Sasaran Program : Meningkatnya hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan				
Indikator Kinerja Sasaran Program:				
1.	Persentase hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan	25%	25%	100%
2.	Persentase peningkatan penanganan permukiman kumuh di wilayah Perdesaan	0%	0%	0%
3.	Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni di wilayah perdesaan	22,5%	22,5%	100%

Berdasarkan tabel capaian kinerja di atas, capaian kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan pada triwulan I Tahun 2025 yaitu sebesar **25%** dari indikator persentase hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan dengan realisasi sebagai berikut:

- Kegiatan program BPS sebesar 5% meliputi tersusunnya dasar peraturan pelaksanaan, tercapainya pengumpulan data rumah tidak layak huni, dan pengusulan kegiatan.
- Kegiatan program Rusun sebesar 5% meliputi terlaksananya progres pekerjaan fisik mencapai 60% , Kegiatan program Rusun sebesar 5% meliputi terlaksananya identifikasi kebutuhan anggaran untuk

penyelesaian fisik, dan pemantauan dan pelaporan pembangunan perdesaan.

- c. Kegiatan program Rusus sebesar 5% meliputi tersusunnya dasar peraturan pelaksanaan bantuan rumah khusus, terlaksananya identifikasi kebutuhan administrasi dan anggaran pelaksanaan bantuan rumah khusus, dan tercapainya target pelaksanaan fisik mencapai 90%.
- d. Kegiatan program FLPP sebesar 2,5% yaitu terlaksananya koordinasi akses data perumahan FLPP kepada BP Tapera.
- e. Terbentuknya Satgas Pendataan Perumahan pada delineasi perdesaan
- f. Tersusunnya MOU dengan K/L lainnya untuk Pendataan rumah tidak layak huni dan penanganannya

Indikator kinerja kedua adalah persentase peningkatan penanganan permukiman kumuh di wilayah perdesaan dengan sub indikator persentase hunian layak dan terjangkau melalui Intervensi langsung tidak terealisasi dikarenakan pada Tahun Anggaran 2025 tidak ada anggaran untuk penanganan kawasan kumuh untuk wilayah Perdesaan.

Kemudian pada **indikator kinerja ketiga** yaitu persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni di wilayah perdesaan dengan capaian sebesar **22,5%**, dengan realisasi kegiatannya meliputi tersusunnya rencana strategis dan tersusunnya format monitoring intervensi Ditjen Perdesaan terhadap rumah tidak layak huni.

2.1.2. Capaian Dukungan Manajemen Triwulan I

Capaian kinerja triwulan Program Dukungan Manajemen dapat diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dengan target perjanjian kinerja. Target kinerja triwulan I Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan diperoleh dari Rencana Strategis RPJMN 2025–2029. Adapun persentase capaian pada triwulan I Tahun 2025, diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1.2 Capaian Dukungan Manajemen triwulan I Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian TW IV(%)
Kegiatan 1:				
Sasaran program : Meningkatnya kualitas dukungan manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan				
Indikator Kinerja Sasaran Program				
Indikator Kinerja Sasaran Strategi : Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan		21,29%	21,29%	100%
1.	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	18,3%	18,3%	100%
1.1.	Sub-indikator Pengelolaan Arsip Dinamis	9,14%	9,14%	100%
1.2.	Sub-indikator Sumber Daya Kearsipan	9,14%	9,14%	100%
2.	Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN	17,5%	17,5%	100%
2.1.	Sub-indikator Tingkat Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN	5,26%	5,26%	100%
2.2.	Sub-indikator Tingkat tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN	5,26%	5,26%	100%
2.3.	Sub-indikator Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN	7,01%	7,01%	100%
3.	Tingkat layanan pembentukan produk hukum	20,1%	20,1%	100%
3.1.	Sub-indikator Tingkat efektivitas penyelesaian produk hukum	5,03%	5,03%	100%
3.2.	Sub-indikator Tingkat efektivitas penyusunan perjanjian	5,03%	5,03%	100%



3.3 Sub-indikator tingkat efektifitas penyusunan pertimbangan hukum	5,03%	5,03%	100%
3.4. Sub-indikator tingkat efektifitas advokasi hukum	5,03%	5,03%	100%
4. Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana	17,5%	17,5%	100%
5. Nilai Kinerja Anggaran	22,1%	22,1%	100%
5.1. Sub-indikator Nilai IKPA Unit Organisasi berdasarkan aplikasi MONEV-PA	13,23%	13,23%	100%
5.2. Sub-indikator Nilai Pagu Minus di Unit Organisasi	4,41%	4,41%	100%
5.3. Sub-indikator Persentase satuan kerja yang dilakukan pembinaan kinerja pelaksanaan anggaran dibandingkan dengan total satuan kerja di Unit Organisasi	4,41%	4,41%	100%
6. Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	25%	25%	100%
7. Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Organisasi	23,1%	23,1%	100%
7.1. Sub-indikator Jumlah Laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan	5,53%	5,53%	100%
7.2. Sub-indikator Nilai Evaluasi AKIP Unit Organisasi	0%	0%	0%
8. Tingkat Layanan Komunikasi Publik	21,4%	21,4%	100%
8.1. Sub-indikator Persentase sentimen pemberitaan positif dan netral di media, dibandingkan dengan jumlah total pemberitaan	10,69%	10,69%	100%
8.2. Sub-indikator Persentase jumlah pelayanan publik yang ditindaklanjuti terhadap pemohon pelayanan publik	10,69%	10,69%	100%



9. Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi	25%	25%	100%
10. Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP	23%	23%	100%
10.1. Sub-indikator Jumlah Laporan Penyelenggaraan SPIP Unit Kerja di lingkungan Unit Organisasi yang tepat waktu	2,3%	2,3%	100%
10.2. Sub-indikator Terselenggaranya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP di Unit Organisasi	9,2%	9,2%	100%
10.3 Sub-indikator Nilai Komponen Struktur dan Proses Maturitas SPIP di Unit Organisasi	0%	0%	0%

Berdasarkan tabel capaian kinerja di atas, capaian kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan pada triwulan I Tahun 2025 yaitu sebesar **18,3%** dari indikator kinerja Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan dengan persentase sub indikator dan realisasi sebagai berikut:

- Sub indikator pertama**, yaitu Pengelolaan Arsip Dinamis, yang pada triwulan I tahun 2025 memiliki capaian **9,14%**. Realisasi terhadap sub indikator pertama yang dilakukan pada triwulan I adalah terlaksananya Layanan Pengelolaan Arsip melalui Pengendalian Naskah Dinas, Penggunaan Arsip, Pemeliharaan Arsip di Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.
- Sub indikator kedua**, yaitu Sumber Daya Kearsipan, yang pada triwulan I tahun 2025 memiliki capaian **9,14%**. Realisasi terhadap sub indikator kedua yang dilakukan pada triwulan I adalah tersediannya SDM Kearsipan dan Prasarana dan Sarana Kearsipan.

Indikator kinerja kedua adalah Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN, dengan capaian kinerja pada triwulan I sebesar **17,5%** dan persentase sub indikator serta realisasi sebagai berikut:

- Sub indikator pertama**, yaitu Tingkat Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN, yang pada triwulan I tahun 2025 memiliki capaian **5,26%**.

Realisasi terhadap sub indikator pertama yang dilakukan pada triwulan I adalah terlaksananya pendataan BMN tepat waktu.

- b. **Sub indikator kedua**, yaitu Tingkat tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtangan dan penghapusan BMN, yang pada triwulan I tahun 2025 memiliki capaian **5,26%**. Realisasi terhadap sub indikator kedua yang dilakukan pada triwulan I adalah terlaksananya pemanfaatan serta pengelolaan BMN .
- c. **Sub indikator ketiga**, yaitu Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN, yang pada triwulan I tahun 2025 memiliki capaian **7,01%**. Realisasi terhadap sub indikator ketiga yang dilakukan pada triwulan I adalah terlaksananya penetapan status penggunaan BMN.

Indikator kinerja ketiga adalah Tingkat layanan pembentukan produk hukum, dengan capaian kinerja pada triwulan I sebesar **20,1%** dengan rincian penilaian sebagai berikut :

- i. Tingkat efektivitas penyelesaian produk hukum dengan persentase capaian sebesar **5,03%** dan realisasi kinerja yaitu 1. tersusunnya Produk Hukum Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.
- ii. Tingkat Efektivitas Penyusunan Perjanjian dengan persentase capaian sebesar **5,03%** dan realisasi kinerja yaitu 2. tersusunnya Perjanjian pada Direktorat Jenderal Perdesaan.
- iii. Tingkat efektivitas penyusunan pertimbangan hukum dengan persentase capaian sebesar **5,03%** dan realisasi kinerja yaitu tersusunnya usulan Pertimbangan Hukum Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.
- iv. Tingkat efektivitas advokasi hukum di Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan dengan persentase capaian sebesar **5,03%** dan realisasi kinerja yaitu tidak ada perkara yang terselesaikannya jumlah perkara di Direktorat Jenderal Perdesaan.

Indikator kinerja keempat adalah Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana, dengan capaian

kinerja pada triwulan I sebesar **17,5%**, dengan realisasi yaitu terlaksananya survei kepuasan layanan pengelolaan kepegawaian di Direktorat Jenderal Perumahan perdesaan.

Indikator kinerja kelima adalah Nilai Kinerja Anggaran, dengan capaian kinerja pada triwulan I sebesar **22,1%**, dengan rincian penilaian kinerja sebagai berikut :

- i. Nilai IKPA Unit Organisasi berdasarkan aplikasi MONEV-PA, dengan persentase capaian sebesar **13,05%** dan realisasi kinerja yaitu terealisasinya nilai IKPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan pada aplikasi Monev PA.
- ii. "Nilai pagu minus di Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, dengan persentase capaian sebesar **4,35%** dan realisasi kinerja yaitu tidak ada nilai pagu minus di Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan .
- iii. Tingkat pembinaan kinerja pelaksanaan anggaran dibandingkan dengan total satuan kerja di Unit Organisasi, dengan persentase capaian sebesar **4,35%** dan realisasi kinerja yaitu terlaksananya penyusunan kegiatan pembinaan kinerja pelaksanaan anggaran di Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Indikator kinerja keenam adalah Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI, dengan capaian kinerja pada triwulan I sebesar **25%**. Realisasi yang dilakukan terhadap indikator kinerja tersebut adalah telah dilaksanakannya tidak ada rekomendasi temuan LHP BPK RI dikarenakan kementerian baru berdiri pada Oktober 2024.

Indikator kinerja ketujuh adalah Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Organisasi, dengan capaian kinerja pada triwulan I sebesar **23,1%** dengan realisasi kinerja yaitu terkumpulnya LKJ dari unit kerja.

Indikator kinerja kedelapan adalah Tingkat Layanan Komunikasi Publik, dengan capaian kinerja pada triwulan I sebesar **21,4%** dan persentase sub indikator serta realisasi sebagai berikut:

- a. **Sub indikator pertama**, yaitu persentase sentimen pemberitaan positif dan netral di media, dibandingkan dengan jumlah total pemberitaan, yang pada triwulan I tahun 2025 memiliki capaian **10,69%**. Realisasi terhadap sub indikator pertama yang dilakukan pada triwulan I adalah terlaksananya *launching* sosial media Ditjen perumahan perdesaan.
- b. **Sub indikator kedua**, yaitu persentase jumlah pelayanan publik yang ditindaklanjuti terhadap pemohon pelayanan publik, yang pada triwulan I tahun 2025 memiliki capaian **10,69%**. Realisasi terhadap sub indikator kedua yang dilakukan pada triwulan I adalah penyusunan sistem aplikasi SPAN Lapor.

Indikator kinerja kesembilan adalah Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi, dengan capaian kinerja pada triwulan I sebesar **25%**. Realisasi yang dilakukan terhadap indikator kinerja tersebut adalah terlaksananya Konsep Dokumen layanan Data dan Informasi Bidang perumahan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.

Indikator kinerja kesepuluh adalah Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP, dengan capaian kinerja pada triwulan I sebesar **23%** dengan realisasi kegiatan yaitu telah dilaksanakannya persiapan penilaian mandiri SPIP meliputi pengumpulan bukti dukung Juli-Desember 2024.

2.2 Capaian Kegiatan Triwulan I

2.2.1 Capaian Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

2.2.1.1 Realisasi Kinerja Dukungan Manajemen Triwulan I

Capaian kinerja triwulan Program Dukungan Manajemen dapat diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dengan target perjanjian kinerja. Target kinerja triwulan I Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan diperoleh dari Rencana Strategis RPJMN 2025-2029. Adapun persentase capaian pada triwulan I Tahun 2025, diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 2.2.1.1 Capaian Dukungan Manajemen Triwulan I Sekretariat Direktorat Jenderal
Perumahan Perdesaan**

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian TW I (%)
Kegiatan 2 :Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan				
Sasaran kegiatan: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan				
Indikator Kinerja Kegiatan				
1.	Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan perdesaan	22%	22%	100%
1.1	Sub-indikator 1 : Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN	18,54%	18,54%	100%
i.	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN	5,56%	5,56%	100%
ii.	Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN	5,56%	5,56%	100%
iii.	Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN	7,42%	7,42%	100%
1.2	Sub-indikator 2 : Tingkat Layanan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian	25%	25%	100%
1.3	Sub-indikator 3 : Nilai Kinerja anggaran unit kerja	21,75%	21,75%	100%
1.4	Sub-indikator 4 : Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	25%	25%	100%
1.5	Sub-indikator 5 : Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	18,44%	18,44%	100%
i.	Laporan AKIP yang telah diselesaikan	18,44%	18,44%	100%
ii.	Nilai evaluasi AKIP unit kerja	-	-	-
1.6	Sub-indikator 6 : "Tingkat Layanan Komunikasi Publik"	21,37%	21,37%	100%
i.	Sentimen pemberitaan positif dan netral di media	9,22%	9,22%	100%
ii.	pelayanan publik yang ditindaklanjuti	9,22%	9,22%	100%
1.7	Sub-indikator 7 : Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	18,27%	18,27%	100%

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian TW I (%)
i.	Pengelolaan arsip dinamis	9,14%	9,14%	100%
ii.	Sumber Daya Kearsipan	9,14%	9,14%	100%
1.8	Sub-indikator 8 : Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum	20,1%	20,1%	100%
i.	Tingkat efektivitas penyelesaian produk hukum	5,03%	5,03%	100%
ii.	Tingkat Efektivitas Penyusunan Perjanjian	5,03%	5,03%	100%
iii.	Tingkat Efektivitas Penyusunan Pertimbangan Hukum	5,03%	5,03%	100%
iv.	Tingkat efektivitas advokasi hukum	5,03%	5,03%	100%
1.9	Sub-indikator 9 : Tingkat Kualitas Laporan Penyelenggaraan SPIP	9,2%	9,2%	100%
i.	Laporan Penyelenggaraan SPIP Unit Kerja di Direktorat Jenderal perumahan Perdesaan	9,2%	9,2%	100%
ii.	Penilaian Mandiri Maturitas SPIP di Direktorat Jenderal perumahan perdesaan	-	-	-
iii.	Nilai Komponen Struktur dan Proses Maturitas SPIP di Direktorat Jenderal Perumahan perdesaan	-	-	-
Pelaksana: Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan				

Berdasarkan tabel capaian kinerja di atas, capaian kinerja pada kegiatan Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan pada Triwulan I Tahun 2025 yaitu sebesar **22%** dari indikator tingkat dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, dengan persentase sub indikator dan realisasinya sebagai berikut:

2. **Sub indikator pertama**, yaitu tingkat efektivitas pengelolaan BMN di Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan sebesar **18,54%**, dengan rincian penilaian efektivitas sebagai berikut :
 - i. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN dengan persentase capaiannya sebesar **5,56%** dan realisasi kegiatannya yaitu

- terlaksanannya pendataan BMN tepat waktu di Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.
- ii. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN dengan persentase capaiannya sebesar **5,56%** dan realisasi kegiatannya yaitu terlaksananya pemanfaatan serta pengelolaan BMN di Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.
 - iii. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN dengan persentase capaiannya sebesar **7,41%** dengan realisasi kegiatannya yaitu terlaksananya penetapan status penggunaan BMN di Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.
3. **Sub indikator kedua**, yaitu tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian di Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan sebesar **25%**, dengan realisasi kinerja yaitu, terlaksananya pembinaan pegawai melalui kegiatan diklat dan seminar serta terlaksananya pengelolaan kepegawai melalui kenaikan pangkat dan jabatan fungsional di Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.
 4. **Sub indikator ketiga**, yaitu nilai kinerja anggaran di Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan sebesar **21,75%**, tercapainya nilai kinerja anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.
 5. **Sub indikator keempat**, yaitu tingkat tindak lanjut rekomendasi atas temuan LHP BPK RI sebesar **25%**, dengan realisasi kinerja yaitu, tidak ada rekomendasi temuan LHP BPK RI dikarenakan kementerian baru berdiri pada Oktober 2024 .
 6. **Sub indikator kelima**, yaitu Tingkat penyelenggaraan AKIP di Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan sebesar **18,44%**, dengan realisasi kegiatannya yaitu Tersusunnya laporan rencana aksi dan laporan AKIP Triwulan I di Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.

7. **Sub indikator keenam**, yaitu tingkat layanan komunikasi publik sebesar **21,37%**, dengan rincian penilaian sebagai berikut :
- Sentimen pemberitaan positif dan netral di media dengan persentase capaian sebesar **9,22%** dan realisasi kinerja yaitu telah dilaksanakannya pembuatan sosial media Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan dan pengelolaan *website* Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan di MyPKP.
 - Pelayanan publik yang ditindaklanjuti dengan persentase capaian sebesar **9,22%** dan realisasi kinerja yaitu terlaksananya penyusunan konsep SPAN Lapor.
8. **Sub indikator ketujuh**, yaitu tingkat kualitas pengelolaan kearsipan sebesar **18,27%**, dengan rincian penilaian sebagai berikut :
- Pengelolaan arsip dinamis dengan persentase capaian sebesar **9,14%** dan realisasi kinerja yaitu terlaksananya Layanan Pengelolaan Arsip melalui Pengendalian Naskah Dinas, Penggunaan Arsip dan Pemeliharaan Arsip.
 - Sumber Daya Kearsipan dengan persentase capaian sebesar **9,14%** dan realisasi kinerja yaitu terlaksananya proses penyusunan kebutuhan SDM Kearsipan pada Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan dan penyusunan Kebutuhan Prasarana dan Sarana Kearsipan.
9. **Sub indikator kedelapan**, yaitu tingkat layanan pembentukan produk hukum sebesar **20,1%**, dengan rincian penilaian sebagai berikut :
- Tingkat efektivitas penyelesaian produk hukum dengan persentase capaian sebesar **5,03%** dan realisasi kinerja yaitu tersusunnya 6 produk hukum berbentuk Keputusan Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan.
 - Tingkat Efektivitas Penyusunan Perjanjian dengan persentase capaian sebesar **5,03%** dan realisasi kinerja yaitu terlaksananya proses penyusunan konsep perjanjian Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.

- vii. Tingkat efektivitas penyusunan pertimbangan hukum dengan persentase capaian sebesar **5,03%** dan realisasi kinerja yaitu tersusunnya usulan Pertimbangan Hukum Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan sebanyak 7 usulan pertimbangan hukum.
 - viii. Tingkat efektivitas advokasi hukum dengan persentase capaian sebesar **5,03%** dan realisasi kinerja yaitu tidak ada perkara yang terselesaikan karena tidak ada perkara yang terdaftar di Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.
10. **Sub indikator kesembilan**, yaitu tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP sebesar **9,2%** dari penilaian penyusunan laporan Penyelenggaraan SPIP Unit Kerja di Direktorat Jenderal perumahan Perdesaan. Adapun realisasi kinerjanya yaitu Tersusunnya Laporan Penilaian Mandiri SPIP Triwulan I.

2.2.1.2 Realisasi Anggaran Triwulan I

Capaian realisasi anggaran triwulan I dapat diperoleh dengan membandingkan antara realisasi pada triwulan tersebut dengan target yang diperoleh dari Klasifikasi Rincian Output/Rincian Output (KRO/RO) sesuai DIPA Revisi ke-3 berdasarkan nomor SP DIPA-146.04.1.694309/2025 tanggal 23 April 2025. Berikut ini adalah target persentase keuangan dan fisik pada triwulan I Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 2.2.1.2 Capaian Anggaran Triwulan I Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Realisasi Triwulan I		
		Pagu Total	Realisasi	%
	Dukungan Manajemen	8,890,499	277,418	3,12%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	6,941,165	277,418	4%
EBA.994	Layanan Perkantoran	5,153,165	232,117	4,5%
EBA.956	Layanan BMN	60,000	0	0%
EBA.957	Layanan Hukum	200,000	0	0%
EBA.963	Layanan Data dan Informasi	300,000	0	0%
EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	50,000	0	0%

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Realisasi Triwulan I		
		Pagu Total	Realisasi	%
EBA.952	Layanan Umum	1,178,000	0	0%
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	559,334	0	0%
EBB.951	Layanan Sarana Internal	559,334	0	0%
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	845,000	0	0%
EBC.964	Layanan Manajemen SDM	845,000	0	0%
EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	-	0	0%
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	545,000	0	0%
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	50,000	0	0%
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	-	0	0%
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	317,500	0	0%
EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	127,500	0	0%
EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	50,000	0	0%

*Pagu anggaran mengacu pada DIPA revisi ke-3

Berdasarkan tabel realisasi anggaran di atas, pada triwulan I realisasi anggaran oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan pada program dukungan manajemen telah terealisasi **3,12%** dan pada program perumahan dan kawasan permukiman belum dilaksanakan realisasi dikarenakan masih dalam proses perubahan nomenklatur pada aplikasi penganggaran SAKTI.

2.2.2 Capaian Kegiatan Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan

2.2.2.1 Realisasi Kinerja Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Triwulan I

Capaian kinerja triwulan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dengan target perjanjian kinerja. Target kinerja triwulan I Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan diperoleh dari Rencana Strategis RPJMN 2025-2029. Adapun persentase capaian pada triwulan I Tahun 2025, diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.2.2.1 Capaian Triwulan I Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian TW I (%)
Kegiatan 1 : Penyelenggaraan Sistem dan Strategi Perumahan Perdesaan				
Sasaran kegiatan: Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan				
Indikator Kinerja Kegiatan				
1.	Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	22,5%	22,5%	100%
1.1	Merupakan Penggabungan dari 2 Sub-Indikator dengan pembobotan masing-masing: 1.1.1. Sub-indikator perbandingan realisasi jumlah dokumen kebijakan dan strategi, pemrograman, anggaran serta kemitraan penyelenggaraan perumahan perdesaan terhadap target tahunan	8,75%	8,75%	100%
	1.1.2. Sub-indikator perbandingan realisasi jumlah Pemda yang terbina tentang Pembebasan BPHTB, Percepatan PBG, dan PPN bagi MBR terhadap jumlah Pemda di wilayah perdesaan	3,75%	3,75%	100%
1.2.	Sub-indikator perbandingan realisasi jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan terhadap target tahunan	2,5%	2,5%	100%
1.3.	Sub-indikator perbandingan realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perdesaan terhadap target tahunan	10%	10%	100%
2.	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi melalui intervensi tidak langsung di wilayah perdesaan	22,5%	22,5% -	100%
3.	Persentase desa yang mendapat intervensi penurunan RTLH di wilayah perdesaan	22,5%	22,5%	100%
Pelaksana: Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan				

Berdasarkan tabel capaian kinerja di atas, capaian kinerja pada kegiatan Penyelenggaraan Sistem dan Strategi Perumahan Perdesaan pada Triwulan I Tahun 2025 yaitu sebesar **22,5%** dari indikator tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan, dengan persentase sub indikator dan realisasinya sebagai berikut:

- b. **Sub indikator pertama**, yaitu perbandingan realisasi jumlah dokumen kebijakan dan strategi, pemrograman, anggaran serta kemitraan penyelenggaraan perumahan perdesaan terhadap target tahunan sebesar **8,75%** dengan realisasi kinerja yaitu :
 - i. Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan Tahun Anggaran 2025.
 - ii. Tersusunnya Bahan Penelaahan revisi Anggaran Direktorat Jenderal Ditjen Perumahan Perdesaan.
 - iii. Terlaksananya Workshop Penyusunan Penjenjangan Kinerja (Cascading) dan Indikator Kinerja Renstra di Lingkungan Kementerian PKP.
 - iv. Tersusunnya bahan rekomendasi kemitraan Pembangunan Perumahan Perdesaan dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, BPS, Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri.
 - v. Tersusunnya Review Angka Dasar (RAD) Ditjen perumahan Perdesaan TA 2026.
- c. **Sub indikator kedua**, yaitu perbandingan realisasi jumlah Pemda yang terbina tentang Pembebasan BPHTB, Percepatan PBG, dan PPN bagi MBR terhadap jumlah Pemda di wilayah perdesaan sebesar **3,75%** dengan realisasi kinerja yaitu tersusunnya dasar peraturan mengenai Pembebasan BPHTB, Percepatan PBG, dan PPN bagi MBR.
- d. **Sub indikator ketiga**, yaitu perbandingan realisasi jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan terhadap target tahunan sebesar **2,5%** dengan realisasi kinerja

yaitu penyusunan dokumen perbandingan realisasi data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan terhadap target tahunan.

- e. **Sub indikator keempat**, yaitu perbandingan realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perdesaan terhadap target tahunan sebesar **10%** dengan realisasi kinerja yaitu tersusunnya laporan Pemantauan dan Evaluasi Direktorat Jenderal Perumahan perdesaan Triwulan I.

Indikator kinerja kedua adalah persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan yang difasilitasi melalui intervensi tidak langsung di wilayah perdesaan dengan realisasi capaian sebesar **22,5%** dan realisasi kinerja pada Triwulan I yaitu, terlaksananya koordinasi dengan pemerintah daerah terkait fasilitasi rumah tangga yang melakukan pembangunan baru atau renovasi rumah tidak layak huni di wilayah perdesaan berbasis anggaran non PKP.

Kemudian pada **indikator kinerja ketiga** yaitu persentase desa yang mendapat intervensi penurunan RTLH di wilayah perdesaan dengan persentase sebesar **22,5%** dan realisasi kinerja yang dilaksanakan yaitu, terlaksananya penelaahan indikator RPJMN 0607.01 persentase desa yang memiliki rumah layak huni.

2.2.2.2 Realisasi Kinerja Dukungan Manajemen Triwulan I

Capaian kinerja triwulan Program Dukungan Manajemen dapat diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dengan target perjanjian kinerja. Target kinerja triwulan I Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan diperoleh dari Rencana Strategis RPJMN 2025–2029. Adapun persentase capaian pada triwulan I Tahun 2025, diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 2.2.2.2 Capaian Dukungan Manajemen Triwulan I Direktorat Sistem dan Strategi
Pembangunan Perumahan Perdesaan**

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian TW I (%)
Kegiatan 2 :Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan				
Sasaran kegiatan: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan				
Indikator Kinerja Kegiatan				
1. Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan perdesaan		21%	21%	100%
1.1 Sub-indikator 1 : Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN		18,54%	18,54%	100%
i. "Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN		5,56%	5,56%	100%
ii. " Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN		5,56%	5,56%	100%
iii. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN		7,41%	7,41%	100%
1.2 Sub-indikator 2 : Tingkat Layanan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian		25%	25%	100%
1.3 Sub-indikator 3 : Nilai Kinerja anggaran unit kerja		21,75%	21,75%	100%
1.4 Sub-indikator 4 : Tingkat Layanan Manajemen Data unit organisasi		25%	25%	100%
1.5 Sub-indikator 5 : Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		23,05%	23,05%	100%
i. Laporan AKIP yang telah diselesaikan		18,44%	18,44%	100%
ii. Nilai evaluasi AKIP unit kerja		4,61%	4,61%	100%
1.6 Sub-indikator 6 : Tingkat efektifitas penerapan Manajemen Risiko		22,75%	22,75%	100%
i. Laporan Manajemen Risiko yang telah diselesaikan		18,2%	18,2%	100%
ii. Nilai efektivitas MR		-	-	-
1.7 Sub-indikator 7 : Tingkat Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran		18,75%	18,75%	100%
Pelaksana: Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan				

Berdasarkan tabel capaian kinerja di atas, capaian kinerja pada kegiatan Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan pada Triwulan I Tahun 2025 yaitu sebesar **21%** dari indikator tingkat dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan, dengan persentase sub indikator dan realisasinya sebagai berikut:

- a. **Sub indikator pertama**, yaitu tingkat efektivitas pengelolaan BMN sebesar **18,54%**, dengan rincian penilaian efektivitas sebagai berikut:
 - i. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN dengan persentase capaiannya sebesar **5,56%** dan realisasi kegiatannya yaitu terlaksanannya pendataan BMN tepat waktu di Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan.
 - ii. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN dengan persentase capaiannya sebesar **5,56%** dan realisasi kegiatannya yaitu terlaksanannya pemanfaatan serta pengelolaan BMN di Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan.
 - iii. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN dengan persentasenya capaiannya sebesar **7,41%** dan realisasi kegiatannya yaitu terlaksanannya penetapan status penggunaan BMN di Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan.
- b. **Sub indikator kedua**, yaitu tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian sebesar **25%**, dengan realisasi kinerja yaitu, terlaksananya pembinaan pegawai melalui kegiatan diklat dan seminar serta terlaksananya pengelolaan kepegawaian melalui kenaikan pangkat dan jabatan fungsional di Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan.
- c. **Sub indikator ketiga**, yaitu nilai kinerja anggaran sebesar **21,75%**, dengan realisasi kinerja yaitu, tercapainya nilai kinerja anggaran di

Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan.

- d. **Sub indikator keempat**, yaitu tingkat layanan manajemen data unit organisasi sebesar **25%**, dengan realisasi kinerja yaitu, tersusunnya dokumen data dan Informasi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.
- e. **Sub indikator kelima**, yaitu Tingkat penyelenggaraan AKIP sebesar **18,44%**, dari jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dengan realisasi kegiatannya yaitu tersusunnya laporan rencana aksi dan laporan AKIP Triwulan I di Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan.
- f. **Sub indikator keenam**, yaitu tingkat efektivitas penerapan Manajemen Risiko sebesar **18,2%**, dari penilaian jumlah laporan Manajemen Risiko yang telah diselesaikan dengan realisasi kegiatannya yaitu tersusunnya laporan Manajemen Risiko di Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan.
- g. **Sub indikator ketujuh**, yaitu tingkat kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran sebesar **18,75%**, dengan realisasi kinerja yaitu, tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran Triwulan I.

2.2.2.3 Realisasi Anggaran Triwulan I

Capaian realisasi anggaran triwulan I dapat diperoleh dengan membandingkan antara realisasi pada triwulan tersebut dengan target yang diperoleh dari Klasifikasi Rincian Output/Rincian Output (KRO/RO) sesuai DIPA Revisi ke-3 berdasarkan nomor SP DIPA-146.04.1.694309/2025 tanggal 23 April 2025. Berikut ini adalah target persentase keuangan dan fisik pada triwulan I Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 2.2.2.3 Capaian Anggaran Triwulan I Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Realisasi Triwulan I		
		Pagu Total	Realisasi	%
Dukungan Manajemen		458,232	0	0%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	458,232	0	0%
EBA.994	Layanan Perkantoran	353,078	0	0%
EBA.962	Layanan Umum	105,154	0	0%
Perumahan dan Kawasan Permukiman		4,215,509	0	0%
ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	1,676,841	0	0%
ABF.001	Kebijakan, Kemitraan dan Kelembagaan Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1,676,841	0	0%
AEA	Koordinasi	776,841	0	0%
AEA.001	Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	776,841	0	0%
BMA	Data dan Informasi Publik	330,000	0	0%
BMA.001	Data dan Infromasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	330,000	0	0%
FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1,431,828	0	0%
FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1,431,828	0	0%

*Pagu anggaran mengacu pada DIPA revisi ke-3

Berdasarkan tabel realisasi anggaran di atas, pada triwulan I realisasi anggaran oleh Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan pada program dukungan manajemen dan program perumahan dan kawasan permukiman belum dilaksanakan realisasi dikarenakan masih dalam proses perubahan nomenklatur pada aplikasi penganggaran SAKTI.

2.2.3 Capaian Kegiatan Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan

2.2.3.1 Realisasi Kinerja Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Triwulan I

Capaian kinerja triwulan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dengan target perjanjian kinerja. Target kinerja triwulan I Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan diperoleh dari Rencana Strategis RPJMN 2025–2029. Adapun persentase capaian pada triwulan I Tahun 2025, diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.2.3.1 Capaian Triwulan I Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian TW I (%)
Kegiatan 2 : Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan				
Sasaran kegiatan: Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di wilayah perdesaan				
Indikator Kinerja Kegiatan : Tingkat fasilitasi lahan, perizinan dan penghunian perumahan perdesaan		8%	8%	100%
Sub Indikator 1 : Jumlah Dokumen Kebijakan, Perencanaan Teknis dan Dukungan Teknis Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan per tahun		2%	2%	100%
Sub Indikator 2 : Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan per tahun		2%	2%	100%
Sub Indikator 3 : Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan per tahun		4%	4%	100%

Berdasarkan tabel capaian kinerja di atas, capaian kinerja pada Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan pada Triwulan I Tahun 2025 yaitu **8%** dari indikator tingkat fasilitasi lahan, perizinan dan penghunian perumahan perdesaan, dengan persentase sub indikator dan realisasinya sebagai berikut:

- Sub indikator pertama**, yaitu jumlah dokumen kebijakan, perencanaan teknis dan dukungan teknis penyiapan lahan, perizinan dan

penghunian perumahan perdesaan per tahun sebesar **2%** dengan realisasi kinerja yaitu, tersusunnya rencana kegiatan Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan.

- b. **Sub indikator kedua**, yaitu jumlah dokumen data dan informasi penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan perdesaan per tahun sebesar **2%** dengan realisasi kinerja yaitu, terlaksananya inventarisasi data lahan Badan Bank Tanah, Rampasan, Usulan Pemda, Aset BI, Tanah Terlantar.
- c. **Sub indikator ketiga**, yaitu laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan perdesaan per tahun sebesar **4%** dengan realisasi kinerja yaitu, terlaksananya kegiatan pemantauan lokasi perumahan di kawasan perdesaan dan survei verifikasi lahan di Kabupaten Purwakarta dan Bandung Barat.

2.2.3.2 Realisasi Kinerja Dukungan Manajemen Triwulan I

Capaian kinerja triwulan Program Dukungan Manajemen dapat diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dengan target perjanjian kinerja. Target kinerja triwulan I Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan diperoleh dari Rencana Strategis RPJMN 2025–2029. Adapun persentase capaian pada triwulan I Tahun 2025, diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.2.3.2 Capaian Dukungan Manajemen Triwulan I Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian TW I (%)
Kegiatan 3 :Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan				
Sasaran kegiatan: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan				
Indikator Kinerja Kegiatan				
1. Tingkat dukungan manajemen Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan		21,3%	21,3%	100%



Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian TW I (%)
1.1	Sub-indikator 1 : Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	18,54%	18,54%	100%
i.	"Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN	5,56%	5,56%	100%
ii.	"Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN	5,56%	5,56%	100%
iii.	Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN	7,41%	7,41%	100%
1.2	Sub-indikator 2 : Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	25%	25%	100%
1.3	Sub-indikator 3 : Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	21,75%	21,75%	100%
1.4	Sub-indikator 4 : Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	23,05%	23,05%	100%
i.	Laporan AKIP yang telah diselesaikan	18,44%	18,44%	100%
ii.	Nilai evaluasi AKIP unit kerja	4,61%	4,61%	100%
1.5	Sub-indikator 5 : Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	18,2%	18,2%	100%
i.	Laporan Manajemen Risiko yang telah diselesaikan	18,2%	18,2%	100%
ii.	Nilai efektivitas MR	-	-	-
Pelaksana: Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan				

Berdasarkan tabel capaian kinerja di atas, capaian kinerja pada kegiatan Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan pada Triwulan I Tahun 2025 yaitu sebesar **21,3%** dari indikator tingkat dukungan manajemen Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan, dengan persentase sub indikator dan realisasinya sebagai berikut:

- a. **Sub indikator pertama**, yaitu tingkat efektivitas pengelolaan BMN sebesar **18,54%**, dengan rincian penilaian efektivitas sebagai berikut:



- i. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN dengan persentase capaian sebesar **5,56%** dan realisasi kegiatannya yaitu terlaksanannya pendataan BMN tepat waktu di Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan.
 - ii. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN dengan persentase capaian sebesar **5,56%** dan realisasi kegiatannya yaitu terlaksanannya pemanfaatan serta pengelolaan BMN di Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan.
 - iii. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN dengan persentase capaian sebesar **7,41%** dan realisasi kegiatannya yaitu terlaksanannya penetapan status penggunaan BMN di Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan.
- b. **Sub indikator kedua**, yaitu tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian sebesar **25%**, dengan realisasi kinerja yaitu, terlaksanannya pembinaan pegawai melalui kegiatan diklat dan seminar serta terlaksanannya pengelolaan kepegawaian melalui kenaikan pangkat dan jabatan fungsional di Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan.
- c. **Sub indikator ketiga**, yaitu nilai kinerja anggaran sebesar **21,75%**, dengan realisasi kinerja yaitu, tercapainya nilai kinerja anggaran di Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan.
- d. **Sub indikator keempat**, yaitu tingkat penyelenggaraan AKIP sebesar **18,44%**, dari jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dengan realisasi kegiatannya yaitu tersusunnya laporan rencana aksi dan laporan AKIP Triwulan I di Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan.
- e. **Sub indikator kelima**, yaitu tingkat efektivitas penerapan Manajemen Risiko sebesar **18,2%**, dari penilaian jumlah laporan

Manajemen Risiko yang telah diselesaikan dengan realisasi kegiatannya yaitu tersusunya laporan Manajemen Risiko di Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan.

2.2.3.3 Realisasi Anggaran Triwulan I

Capaian realisasi anggaran triwulan I dapat diperoleh dengan membandingkan antara realisasi pada triwulan tersebut dengan target yang diperoleh dari Klasifikasi Rincian Output/Rincian Output (KRO/RO) sesuai DIPA Revisi ke-3 berdasarkan nomor SP DIPA-146.04.1.694309/2025 tanggal 23 April 2025. Berikut ini adalah target persentase keuangan dan fisik pada triwulan I Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 2.2.3.3 Capaian Anggaran Triwulan I Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Realisasi Triwulan I		
		Pagu Total	Realisasi	%
Dukungan Manajemen		448,543	5,331	1,19%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	448,543	5,331	1,19%
EBA.994	Layanan Perkantoran	346,017	0	0%
EBA.962	Layanan Umum	102,526	5,331	5,2%
Perumahan dan Kawasan Permukiman		4,113,525	72,568	1,76%
ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	400,000	8,958	2,24%
ABF.002	Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan	400,000	8,958	2,24%
BMA	Data dan Informasi Publik	200,000	0	0%
BMA.002	Data dan Infromasi Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan	200,000	0	0%
CBR	Dukungan Teknis	2,150,000	43,912	2,04%
CBR.001	Dokumen Dukungan Teknis Penyiapan Lahan dan Perizinan Perumahan Perdesaan	1,150,000	43,453	3,78%
CBR.002	Dokumen Dukungan Teknis Penghunian Perumahan Perdesaan	1,000,000	459	0,05%

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Realisasi Triwulan I		
		Pagu Total	Realisasi	%
FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1,063,525	19,698	1,85%
FAE.002	Pemantauan dan Evaluasi Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan	1,063,525	19,698	1,85%
FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	300,000	0	0%
FBA.001	Pembinaan Pemerintah Daerah Kebijakan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan	300,000	0	0%

*Pagu anggaran mengacu pada DIPA revisi ke-3

Berdasarkan tabel realisasi anggaran di atas, pada triwulan I realisasi anggaran oleh Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan pada program dukungan manajemen telah terealisasi sebesar **1,19%** dan pada program perumahan dan kawasan permukiman telah terealisasi sebesar **1,76%**.

2.2.4. Capaian Kegiatan Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan

2.2.4.1 Realisasi Kinerja Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Triwulan I

Capaian kinerja triwulan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dengan target perjanjian kinerja. Target kinerja triwulan I Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan diperoleh dari Rencana Strategis RPJMN 2025–2029. Adapun persentase capaian pada triwulan I Tahun 2025, diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.2.4.1 Capaian Triwulan I Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian TW I (%)
Kegiatan 3 : Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perdesaan				
Sasaran kegiatan: Meningkatnya akses rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan perumahan di wilayah perdesaan				
Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan perumahan yang terjangkau di wilayah perdesaan		9%	9%	100%
Sub-indikator 1 : Jumlah Kebijakan Bantuan Pembiayaan dan NSPK		2%	2%	100%

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian TW I (%)
Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan				
Sub-indikator 2 : Jumlah Dokumen Kesepakatan Kegiatan KPBU dan Pembiayaan Kreatif Perumahan Perdesaan yang Siap Dikerjasamakan		1%	1%	100%
Sub-indikator 3 : Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembiayaan Perumahan Perdesaan		1%	1%	100%
Sub-indikator 4 : Jumlah Fasilitas dan Koordinasi Penyaluran Bantuan Subsidi/Kemudahan Pembiayaan		5%	5%	100%

Berdasarkan tabel capaian kinerja di atas, capaian kinerja pada Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan pada Triwulan I Tahun 2025 yaitu **9%** dari indikator tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan, dengan persentase sub indikator dan realisasinya sebagai berikut:

- a. **Sub indikator pertama**, yaitu jumlah Kebijakan Bantuan Pembiayaan dan NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan sebesar **2%** dengan realisasi kinerja yaitu :
 - i. Terkumpulnya data dukung penyusunan NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan.
 - ii. Tersusunnya Program dan Anggaran, serta Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan.
 - iii. Terkumpulnya Data Dukung Kebijakan Skema Pembiayaan Kreatif dan Kemitraan Perumahan Perdesaan.
- b. **Sub indikator kedua**, yaitu jumlah Dokumen Kesepakatan Kegiatan KPBU dan Pembiayaan Kreatif Perumahan Perdesaan yang Siap Dikerjasamakan sebesar **1%** dengan realisasi kinerja yaitu terlaksananya koordinasi dengan stakeholder terkait Program KPBU Kementerian PKP.
- c. **Sub indikator ketiga**, yaitu jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembiayaan Perumahan Perdesaan sebesar **1%** dengan realisasi kinerja yaitu tersusunnya format pemantauan dan evaluasi capaian Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan.

- d. **Sub indikator keempat**, yaitu jumlah fasilitasi dan koordinasi penyaluran bantuan subsidi/kemudahan pembiayaan sebesar **5%** dengan realisasi kinerja yaitu terlaksananya koordinasi dengan BP Tapera.

2.2.4.2 Realisasi Kinerja Dukungan Manajemen Triwulan I

Capaian kinerja triwulan Program Dukungan Manajemen dapat diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dengan target perjanjian kinerja. Target kinerja triwulan I Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan diperoleh dari Rencana Strategis RPJMN 2025–2029. Adapun persentase capaian pada triwulan I Tahun 2025, diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.2.4.2 Capaian Dukungan Manajemen Triwulan I Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian TW I (%)
Kegiatan 3 :Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan				
Sasaran kegiatan: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan				
Indikator Kinerja Kegiatan				
1. Tingkat dukungan manajemen Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan		22,2%	22,2%	100%
1.1 Sub-indikator 1 : Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		18,54%	18,54%	100%
i. "Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN		5,56%	5,56%	100%
ii. "Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN		5,56%	5,56%	100%
iii. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN		7,41%	7,41%	100%
1.2 Sub-indikator 2 : Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian		25%	25%	100%
1.3 Sub-indikator 3 : Nilai kinerja anggaran Unit Kerja		21,75%	21,75%	100%

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian TW I (%)
1.4	Sub-indikator 4 : Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	18,44%	18,44%	100%
i.	Laporan AKIP yang telah diselesaikan	18,44%	18,44%	100%
ii.	Nilai evaluasi AKIP unit kerja	0%	0%	100%
1.5	Sub-indikator 5 : Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	18,2%	18,2%	100%
i.	Laporan Manajemen Risiko yang telah diselesaikan	18,2%	18,2%	100%
ii.	Nilai efektivitas MR	-	-	-
Pelaksana: Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan				

Berdasarkan tabel capaian kinerja di atas, capaian kinerja pada kegiatan Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan pada Triwulan I Tahun 2025 yaitu sebesar **22,2%** dari indikator tingkat dukungan manajemen Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan, dengan persentase sub indikator dan realisasinya sebagai berikut:

- a. **Sub indikator pertama**, yaitu tingkat efektivitas pengelolaan BMN sebesar **18,54%**, dengan rincian penilaian efektivitas sebagai berikut:
 - i. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN dengan persentase capaian sebesar **5,56%** dan realisasi kegiatannya yaitu terlaksanannya pendataan BMN tepat waktu di Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan.
 - ii. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN dengan persentase capaian sebesar **5,56%** dan realisasi kegiatannya yaitu terlaksanannya pemanfaatan serta pengelolaan BMN di Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan.
 - iii. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN dengan persentase capaian sebesar **7,41%** dan realisasi kegiatannya

yaitu terlaksananya penetapan status penggunaan BMN di Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan.

- b. **Sub indikator kedua**, yaitu tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian sebesar **25%**, dengan realisasi kinerja yaitu, terlaksananya pembinaan pegawai melalui kegiatan diklat dan seminar serta terlaksananya pengelolaan kepegawaian melalui kenaikan pangkat dan jabatan fungsional di Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan.
- c. **Sub indikator ketiga**, yaitu nilai kinerja anggaran sebesar **21,75%**, dengan realisasi kinerja yaitu, tercapainya nilai kinerja anggaran di Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan.
- d. **Sub indikator keempat**, yaitu tingkat penyelenggaraan AKIP sebesar **18,44%**, dari jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dengan realisasi kegiatannya yaitu tersusunnya laporan rencana aksi dan laporan AKIP Triwulan I di Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan.
- e. **Sub indikator kelima**, yaitu tingkat efektivitas penerapan Manajemen Risiko sebesar **18,2%**, dari penilaian jumlah laporan Manajemen Risiko yang telah diselesaikan dengan realisasi kegiatannya yaitu tersusunnya laporan Manajemen Risiko di Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan.

2.2.4.3 Realisasi Anggaran Triwulan I

Capaian realisasi anggaran triwulan I dapat diperoleh dengan membandingkan antara realisasi pada triwulan tersebut dengan target yang diperoleh dari Klasifikasi Rincian Output/Rincian Output (KRO/RO) sesuai DIPA Revisi ke-3 berdasarkan nomor SP DIPA-146.04.1.694309/2025 tanggal 23 April 2025. Berikut ini adalah target persentase keuangan dan fisik pada triwulan I Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 2.2.4.3 Capaian Anggaran Triwulan I Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Realisasi Triwulan I		
		Pagu Total	Realisasi	%
	Dukungan Manajemen	438,852	45,300	10.32%

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Realisasi Triwulan I		
		Pagu Total	Realisasi	%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	438,852	45,300	10.32%
EBA.994	Layanan Perkantoran	338,955	0	0%
EBA.962	Layanan Umum	99,897	45,300	45.35%
Perumahan dan Kawasan Permukiman		3,897,023	0	0%
ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	1,350,000	0	0%
ABF.003	Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan Perdesaan	1,350,000	0	0%
AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	300,000	0	0%
AFA.001	NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan Perdesaan	300,000	0	0%
AEE	Kemitraan	550,000	0	0%
AEE.001	Kegiatan KPBU dan Pembiayaan Kreatif Perumahan Perdesaan yang Siap Dikerjasamakan	550,000	0	0%
FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	600,000	0	0%
FAE.003	Pemantauan dan Evaluasi Pembiayaan Perumahan Perdesaan	600,000	0	0%
QAH	Pelayanan Publik Lainnya	1,097,023	0	0%
QAH.001	Fasilitasi Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Perdesaan	1,097,023	0	0%
QFC	Subsidi Kepada Keluarga	-	-	0%
QFC.001	Subsidi Pembiayaan Perumahan Perdesaan	-	-	0%

*Pagu anggaran mengacu pada DIPA revisi ke-3

Berdasarkan tabel realisasi anggaran di atas, pada triwulan I realisasi anggaran oleh Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan pada program dukungan manajemen telah terealisasi **10,32%** dan pada program perumahan dan kawasan permukiman belum dilaksanakan realisasi dikarenakan masih dalam proses perubahan nomenklatur pada aplikasi penganggaran SAKTI.

2.2.5 Capaian Kegiatan Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan

2.2.5.1 Realisasi Kinerja Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Triwulan I

Capaian kinerja triwulan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dengan target perjanjian kinerja. Target kinerja triwulan I Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan diperoleh dari Rencana Strategis RPJMN 2025–2029. Adapun persentase capaian pada triwulan I Tahun 2025, diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.2.5.1 Capaian Triwulan I Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian TW I (%)
Kegiatan 4 : Penyediaan rumah yang layak huni di wilayah perdesaan				
Sasaran kegiatan: Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan				
Indikator Kinerja Kegiatan				
1.	Persentase penyelenggaraan kebijakan, data dan informasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan perumahan perdesaan	25%	21,49%	85,96%
1a.	Sub-indikator 1 : Jumlah laporan pemrograman dan penganggaran pembangunan perumahan perdesaan	10%	6,49%	64,90%
1b.	Sub-indikator 2 : Jumlah Kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	5%	5%	100%
1c.	Sub-indikator 3 : Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Perumahan Perdesaan	10%	10%	100%
2.	Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni baru di wilayah perdesaan	25%	381%	1524%
3.	Persentase penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu di wilayah perdesaan	25%	2,44%	9,76%
4.	Persentase rumah yang mendapat prasarana, sarana dan utilitas umum di wilayah perdesaan	0%	-	-
5.	Persentase rumah yang mendapat prasarana, sarana dan utilitas umum hunian vertikal di wilayah perdesaan	0%	-	-
Pelaksana: Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan				

Berdasarkan tabel capaian kinerja di atas, capaian kinerja pada Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan pada Triwulan I Tahun 2025 yaitu

21,49% dari indikator persentase penyelenggaraan kebijakan, data dan informasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan perumahan perdesaan, dengan persentase sub indikator dan realisasinya sebagai berikut:

- a. **Sub indikator pertama**, yaitu jumlah laporan pemrograman dan penganggaran pembangunan perumahan perdesaan sebesar **6,49%** dengan realisasi kinerja yaitu terlaksananya pembahasan Nota Kesepahaman (MoU) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah.
- b. **Sub indikator kedua**, yaitu jumlah Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan sebesar **5%** dengan realisasi kinerja yaitu tersusunnya Rencana Kerja Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan.
- c. **Sub indikator ketiga**, yaitu jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Perumahan Perdesaan sebesar **10%** dengan realisasi kinerja yaitu :
 - i. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pekerjaan Pembangunan Hunian Tetap Pasca Bencana Erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara.
 - ii. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pekerjaan Pembangunan Hunian Tetap Pasca Bencana Banjir Bandang Maluku Utara.

Indikator kinerja kedua adalah persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni baru di wilayah perdesaan dengan realisasi capaian sebesar **381%** dan realisasi kinerja pada Triwulan I yaitu, telah terlaksana pembangunan rumah khusus sebanyak 416 unit dengan progres sebesar 95,16% pada Direktorat Jenderal perumahan Perdesaan.

Indikator kinerja ketiga adalah persentase penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu di wilayah perdesaan dengan realisasi capaian sebesar **2,44%** dan realisasi kinerja pada Triwulan I yaitu, telah terlaksana

pembangunan rumah susun sebanyak 358 unit dengan progres sebesar 61% pada Direktorat Jenderal perumahan Perdesaan.

Kemudian pada **indikator kinerja keempat** adalah persentase rumah yang mendapat bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum di wilayah perdesaan dan **indikator kinerja kelima** persentase rumah yang mendapat bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum hunian vertikal di wilayah perdesaan tidak terealisasi dikarenakan pada Tahun Anggaran 2025 tidak ada anggaran untuk bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum di wilayah perdesaan.

2.2.5.2 Realisasi Kinerja Dukungan Manajemen Triwulan I

Capaian kinerja triwulan Program Dukungan Manajemen dapat diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dengan target perjanjian kinerja. Target kinerja triwulan I Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan diperoleh dari Rencana Strategis RPJMN 2025–2029. Adapun persentase capaian pada triwulan I Tahun 2025, diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.2.5.2 Capaian Dukungan Manajemen Triwulan I Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian TW I (%)
Kegiatan 3 :Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan				
Sasaran kegiatan: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan				
Indikator Kinerja Kegiatan				
1. Tingkat dukungan manajemen Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan		22,2%	22,2%	100%
1.1 Sub-indikator 1 : Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		18,54%	18,54%	100%
i. "Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN		5,56%	5,56%	100%
ii. "Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan		5,56%	5,56%	100%

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian TW I (%)
BMN				
iii.	Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN	7,41%	7,41%	100%
1.2	Sub-indikator 2 : Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	25%	25%	100%
1.3	Sub-indikator 3 : Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	21,75%	21,75%	100%
1.4	Sub-indikator 4 : Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	18,44%	18,44%	100%
i.	Laporan AKIP yang telah diselesaikan	18,44%	18,44%	100%
ii.	Nilai evaluasi AKIP unit kerja	0%	0%	100%
1.5	Sub-indikator 5 : Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	18,2%	18,2%	100%
i.	Laporan Manajemen Risiko yang telah diselesaikan	18,2%	18,2%	100%
ii.	Nilai efektivitas MR	-	-	-
Pelaksana: Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan				

Berdasarkan tabel capaian kinerja di atas, capaian kinerja pada kegiatan Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan pada Triwulan I Tahun 2025 yaitu sebesar **22,2%** dari indikator tingkat dukungan manajemen Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan, dengan persentase sub indikator dan realisasinya sebagai berikut:

- a. **Sub indikator pertama**, yaitu tingkat efektivitas pengelolaan BMN sebesar **18,54%**, dengan rincian penilaian efektivitas sebagai berikut:
 - i. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN dengan persentase capaian sebesar **5,56%** dan realisasi kegiatannya yaitu terlaksanannya pendataan BMN tepat waktu di Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan.
 - ii. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN dengan persentase capaian sebesar

5,56% dan realisasi kegiatannya yaitu terlaksananya pemanfaatan serta pengelolaan BMN di Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan.

- iii. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN dengan persentase capaian sebesar **7,41%** dan realisasi kegiatannya yaitu terlaksananya penetapan status penggunaan BMN di Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan.
- b. **Sub indikator kedua**, yaitu tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian sebesar **25%**, dengan realisasi kinerja yaitu, terlaksananya pembinaan pegawai melalui kegiatan diklat dan seminar serta terlaksananya pengelolaan kepegawaian melalui kenaikan pangkat dan jabatan fungsional di Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan.
- c. **Sub indikator ketiga**, yaitu nilai kinerja anggaran unit kerja sebesar **21,75%**, dengan realisasi kinerja yaitu, tercapainya nilai kinerja anggaran di Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan.
- d. **Sub indikator keempat**, yaitu tingkat penyelenggaraan AKIP unit kerja sebesar **23,05%**, dari jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dengan realisasi kegiatannya yaitu tersusunnya laporan rencana aksi dan laporan AKIP Triwulan I di Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan.
- e. **Sub indikator kelima**, yaitu tingkat efektivitas penerapan Manajemen Risiko sebesar **18,2%**, dari penilaian jumlah laporan Manajemen Risiko yang telah diselesaikan dengan realisasi kegiatannya yaitu tersusunnya laporan Manajemen Risiko di Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan.

2.2.5.3 Realisasi Anggaran Triwulan I

Capaian realisasi anggaran triwulan I dapat diperoleh dengan membandingkan antara realisasi pada triwulan tersebut dengan target yang diperoleh dari Klasifikasi Rincian Output/Rincian Output (KRO/RO) sesuai DIPA Revisi ke-3 berdasarkan nomor SP DIPA-146.04.1.694309/2025 tanggal 23 April 2025. Berikut ini adalah target persentase keuangan dan fisik pada triwulan I Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 2.2.5.3 Capaian Anggaran Triwulan I Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Realisasi Triwulan I		
		Pagu Total	Realisasi	%
Dukungan Manajemen		467,923	0	0%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	467,923	0	0%
EBA.994	Layanan Perkantoran	360,139	0	0%
EBA.962	Layanan Umum	107,784	0	0%
Perumahan dan Kawasan Permukiman		4,763,028	0	0%
ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	3,067,028	0	0%
ABF.004	Kebijakan Pembangunan Perumahan Perdesaan	3,067,028	0	0%
BMA	Data dan Informasi Publik	200,000	0	0%
BMA.003	Data dan Informasi Pembangunan Perumahan Perdesaan	200,000	0	0%
FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1,496,000	0	0%
FAE.004	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Perumahan Perdesaan	1,496,000	0	0%

*Pagu anggaran mengacu pada DIPA revisi ke-3

Berdasarkan tabel realisasi anggaran di atas, pada triwulan I realisasi anggaran oleh Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan pada program dukungan manajemen dan pada program perumahan dan kawasan permukiman belum dilaksanakan realisasi dikarenakan masih dalam proses perubahan nomenklatur pada aplikasi penganggaran SAKTI.

2.2.6 Capaian Kegiatan Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan

2.2.6.1 Realisasi Kinerja Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Triwulan I

Capaian kinerja triwulan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dengan target perjanjian kinerja. Target kinerja triwulan I Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan diperoleh dari Rencana Strategis RPJMN 2025–2029. Adapun persentase capaian pada triwulan I Tahun 2025, diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.2.6.1.1 Capaian Triwulan I Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian TW I (%)
Kegiatan 5 :Unit Kerja Kontributor IKP Penanganan Kumuh DJKP				
Sasaran kegiatan: Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu di wilayah perdesaan				
Indikator Kinerja Kegiatan				
1.	Persentase luasan kumuh yang ditangani secara terpadu di wilayah perdesaan	12,5%	-	-

Berdasarkan tabel capaian kinerja di atas, capaian kinerja pada Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan indikator persentase luasan kumuh yang ditangani secara terpadu di wilayah perdesaan tidak terealisasi dikarenakan pada Tahun Anggaran 2025 tidak ada anggaran untuk penanganan kawasan kumuh untuk wilayah Perdesaan.

Tabel 2.2.6.1.2 Capaian Triwulan I Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian TW I (%)
Kegiatan 6 : Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan				
Sasaran kegiatan : Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan				
Indikator Kinerja Kegiatan				
1.	Persentase penyelenggaraan kebijakan, data dan informasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan peningkatan kualitas pembangunan perumahan perdesaan	9 %	9%	100%
1a.	Sub-indikator 1 : Jumlah Dokumen Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	5%	5%	100%
1b.	Sub-indikator 2 : Jumlah Dokumen Data dan Informasi Peningkatan Kualitas Perumahan	2%	2%	100%
1c.	Sub-indikator 3 : Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Perumahan Perdesaan	2%	2%	100%
2.	Persentase penyediaan unit rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan perdesaan	5 %	5%	100%
Pelaksana: Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan				

Berdasarkan tabel capaian kinerja di atas, capaian kinerja pada Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan pada Triwulan I Tahun 2025 yaitu **9%** dari indikator persentase penyelenggaraan kebijakan, data dan informasi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan peningkatan kualitas pembangunan perumahan perdesaan, dengan persentase sub indikator dan realisasinya sebagai berikut:

- a. **Sub indikator pertama**, yaitu jumlah Dokumen Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan sebesar **5%** dengan realisasi kinerja yaitu :
 - i. Terlaksananya pembahasan Revisi Permen PUPR No. 7 Tahun 2022.
 - ii. Terlaksananya pembahasan Penyusunan SE Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya.
 - iii. Terlaksananya koordinasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan Komisi V DPR RI.
- b. **Sub indikator kedua**, yaitu jumlah Dokumen Data dan Informasi Peningkatan Kualitas Perumahan sebesar **2%** dengan terlaksananya persiapan Pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
- c. **Sub indikator ketiga**, yaitu jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Perumahan Perdesaan sebesar **2%** dengan tersusunnya Konsep Pemantauan dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan.

Kemudian pada **indikator kinerja kedua** yaitu persentase penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan perdesaan dengan persentase sebesar **5%** dan realisasi kinerja yang dilaksanakan yaitu, terlaksananya sosialisasi persiapan BSPS tahun anggaran 2025 dengan komisi V DPR RI.

2.2.6.2 Realisasi Kinerja Dukungan Manajemen Triwulan I

Capaian kinerja triwulan Program Dukungan Manajemen dapat diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dengan target perjanjian

kinerja. Target kinerja triwulan I Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan diperoleh dari Rencana Strategis RPJMN 2025–2029. Adapun persentase capaian pada triwulan I Tahun 2025, diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.2.6.2 Capaian Dukungan Manajemen Triwulan I Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian TW I (%)
Kegiatan 6 :Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan				
Sasaran kegiatan: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan				
Indikator Kinerja Kegiatan				
1. Tingkat dukungan manajemen Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan		22,2%	22,2%	100%
1.1 Sub-indikator 1 : Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		18,54%	18,54%	100%
i. "Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN		5,56%	5,56%	100%
ii. "Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN		5,56%	5,56%	100%
iii. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN		7,41%	7,41%	100%
1.2 Sub-indikator 2 : Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian		25%	25%	100%
1.3 Sub-indikator 3 : Nilai kinerja anggaran Unit Kerja		21,75%	21,75%	100%
1.4 Sub-indikator 4 : Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		23,05%	23,05%	100%
i. Laporan AKIP yang telah diselesaikan		18,44%	18,44%	100%
ii. Nilai evaluasi AKIP unit kerja		4,61%	4,61%	100%
1.5 Sub-indikator 5 : Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko		18,2%	18,2%	100%
i. Laporan Manajemen Risiko yang telah diselesaikan		18,2%	18,2%	100%
ii. Nilai efektivitas MR		-	-	-

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian TW I (%)
Pelaksana: Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan				

Berdasarkan tabel capaian kinerja di atas, capaian kinerja pada kegiatan Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan pada Triwulan I Tahun 2025 yaitu sebesar **22,2%** dari indikator tingkat dukungan manajemen Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan, dengan persentase sub indikator dan realisasinya sebagai berikut:

- a. **Sub indikator pertama**, yaitu tingkat efektivitas pengelolaan BMN sebesar **18,54%**, dengan rincian penilaian efektivitas sebagai berikut:
 - i. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN dengan persentase capaian sebesar **5,56%** dan realisasi kegiatannya yaitu terlaksanannya pendataan BMN tepat waktu di Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan.
 - ii. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN dengan persentase capaian sebesar **5,56%** dan realisasi kegiatannya yaitu terlaksanannya pemanfaatan serta pengelolaan BMN di Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan.
 - iii. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN dengan persentase capaian sebesar **7,41%** dan realisasi kegiatannya yaitu terlaksanannya penetapan status penggunaan BMN di Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan.
- b. **Sub indikator kedua**, yaitu tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian sebesar **25%**, dengan realisasi kinerja yaitu, terlaksanannya pembinaan pegawai melalui kegiatan diklat dan seminar serta terlaksanannya pengelolaan kepegawaian melalui kenaikan pangkat dan jabatan fungsional di Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan.

- c. **Sub indikator ketiga**, yaitu nilai kinerja anggaran unit kerja sebesar **21,75%**, dengan realisasi kinerja yaitu, tercapainya nilai kinerja anggaran di Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan.
- d. **Sub indikator keempat**, yaitu tingkat penyelenggaraan AKIP unit kerja sebesar **18,44%**, dari jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dengan realisasi kegiatannya yaitu tersusunnya laporan rencana aksi dan laporan AKIP Triwulan I di Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan.
- e. **Sub indikator kelima**, yaitu tingkat efektivitas penerapan Manajemen Risiko sebesar **18,2%**, dari penilaian jumlah laporan Manajemen Risiko yang telah diselesaikan dengan realisasi kegiatannya yaitu tersusunnya laporan Manajemen Risiko di Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan.

2.2.6.3 Realisasi Anggaran Triwulan I

Capaian realisasi anggaran triwulan I dapat diperoleh dengan membandingkan antara realisasi pada triwulan tersebut dengan target yang diperoleh dari Klasifikasi Rincian Output/Rincian Output (KRO/RO) sesuai DIPA Revisi ke-3 berdasarkan nomor SP DIPA-146.04.1.694309/2025 tanggal 23 April 2025. Berikut ini adalah target persentase keuangan dan fisik pada triwulan I Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 2.2.6.3 Capaian Anggaran Triwulan I Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Realisasi Triwulan I		
		Pagu Total	Realisasi	%
Dukungan Manajemen		477,612	0	0%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	477,612	0	0%
EBA.994	Layanan Perkantoran	367,200	0	0%
EBA.962	Layanan Umum	110,412	0	0%
Perumahan dan Kawasan Permukiman		5,196,031	0	0%
ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	2,100,000	0	0%
ABF.005	Kebijakan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	2,100,000	0	0%

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Realisasi Triwulan I		
		Pagu Total	Realisasi	%
BMA	Data dan Informasi Publik	1,525,000	0	0%
BMA.004	Data dan Informasi Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1,525,000	0	0%
FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1,571,031	0	0%
FAE.005	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1,571,031	0	0%

*Pagu anggaran mengacu pada DIPA revisi ke-3

Berdasarkan tabel realisasi anggaran di atas, pada triwulan I realisasi anggaran oleh Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan pada program dukungan manajemen dan program perumahan dan kawasan permukiman belum dilaksanakan realisasi dikarenakan masih dalam proses perubahan nomenklatur pada aplikasi penganggaran SAKTI.

2.3 Permasalahan/Potensi Capaian Triwulan I

Dalam pelaksanaan kegiatan pada Triwulan I Tahun 2025, terdapat beberapa permasalahan yang mempengaruhi optimalisasi pencapaian kinerja. Permasalahan tersebut antara lain masih terbatasnya dasar hukum pelaksanaan kegiatan sehubungan dengan baru terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, sehingga sejumlah kebijakan dan pedoman teknis belum sepenuhnya tersedia sebagai acuan pelaksanaan.

Selain itu, struktur organisasi dan pembagian tugas unit kerja belum sepenuhnya terbentuk dan terdistribusi secara efektif, yang berdampak pada perlunya penyesuaian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, termasuk koordinasi antar unit kerja. Kondisi tersebut berimplikasi pada belum optimalnya percepatan pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja pada Triwulan I.

Namun demikian, kondisi ini sekaligus menjadi potensi capaian untuk triwulan berikutnya, seiring dengan proses pembentukan dan penyempurnaan regulasi, struktur organisasi, serta mekanisme kerja yang



diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan secara bertahap.





BAB III

PENUTUP



BAB 3 PENUTUP

3.1 Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka memastikan peningkatan capaian kinerja pada triwulan berikutnya, diperlukan upaya tindak lanjut yang disusun berdasarkan hasil evaluasi atas permasalahan serta potensi capaian pada Triwulan I. Rencana tindak lanjut ini menjadi acuan perbaikan dan penguatan pelaksanaan program di setiap Unit Kerja agar target kinerja dapat dicapai secara lebih optimal, terukur, dan sesuai dengan prioritas Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan. Adapun rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut (Tw+1)
1.	Terbatasnya dasar hukum pelaksanaan kegiatan sehubungan dengan baru terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.	Melakukan percepatan penyusunan dan penetapan kebijakan, pedoman teknis, serta produk hukum pendukung sebagai acuan pelaksanaan tugas dan fungsi.
2.	Struktur organisasi dan pembagian tugas unit kerja belum sepenuhnya terbentuk dan terdistribusi secara efektif.	Melakukan penyempurnaan struktur organisasi serta penegasan pembagian tugas dan fungsi unit kerja untuk meningkatkan kejelasan peran dan tanggung jawab.
3.	Koordinasi antar unit kerja belum berjalan optimal pada tahap awal pelaksanaan kegiatan.	Memperkuat mekanisme koordinasi internal melalui forum koordinasi rutin dan penyesuaian alur kerja guna mendukung percepatan pencapaian kinerja.

